

Agenda Setting dan Peranan Pers

Hadi Surantio¹, Nurhasanah²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nasional (Unas)¹

Universitas Nasional (Unas)²

Email : Hadi_surantio@yahoo.com¹, savana62@yahoo.co.id²

Abstrak

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia di era reformasi ini menginginkan sistem politik yang terbuka, begitu pula dengan sistem pers nasional. Pers diharapkan mengacu pada agenda publik di mana sumber informasi begitu bervariasi, yang dapat dijadikan bahan liputan media massa. Dengan mekanisme kerja pers yang seperti ini, diharapkan pers menjadi agent of social control yang efektif dalam mengangkat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Keterkaitan agenda setting media massa dengan proses mengambil suatu keputusan dapat dilihat dalam konteks pembentukan pendapat umum (public opinion).

Kata Kunci : *Agenda Setting, Peran, Pers*

Abstract

The results of this study explain that the Indonesian people in this reform era want an open political system, as well as a national press system. The press is expected to refer to the public agenda where the sources of information are so varied, which can be used as material for mass media coverage. With a press mechanism like this, it is hoped that the press will become an effective agent of social control in elevating the inequalities that occur. The relationship between the agenda setting of the mass media and the process of making a decision can be seen in the context of the formation of public opinion.

Keywords: *Agenda Setting, Role, Press*

PENDAHULUAN

Seiring jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, maka era perubahan (reformasi) pun bergulir. Era ini telah membawa angin segar of change yang meliputi semua aspek kehidupan, termasuk pers. Pers yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan secara otomatis juga menikmati keadaan ini, di mana sebelumnya pers begitu dikungkung dan dibelenggu dengan sikap represif rezim penguasa saat itu. Meski keran kebebasan telah dibuka, agar pers tidak kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya, maka fungsi-fungsi to inform, to educate, dan to entertain tetap menjadi fungsi utama yang diemban pers. Namun bergulirnya era reformasi sebagaimana diupayakan mahasiswa dan kaum reformis, menuntut pers lebih bernyali dan mempunyai gigi yang lebih tajam dalam mengemban fungsi social control.

Adapun fungsi pers yang diemban adalah sama dengan fungsi mass communication, dengan kata lain fungsi pers adalah fungsi komunikasi massa. Jadi dalam telaah tulisan ini penggunaan terminologi fungsi pers dan fungsi komunikasi massa, sekalipun dipaparkan dengan cara penyampaian yang bergantian, namun maknanya sama. Dalam rangka meningkatkan perannya dalam kegiatan pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat,

meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan social control yang konstruktif. Untuk itu perlu ditumbuh-kembangkan interaksi yang positif antara pemerintah, pers dan masyarakat, begitu bunyi UU Pokok Pers No.21/1982.

Di sisi lain UU No. 24/1997 tentang penyiaran dikatakan, bahwa penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan, dan hiburan yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Kedua isi undang-undang di atas mempunyai fungsi yang berbeda antara pers media cetak dan pers media penyiaran. Padahal, pers dalam arti luas dimaknai sebagai keseluruhan media baik surat kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, dan film. Sehingga perbedaan fungsi yang diemban media cetak dan elektronik seyogianya sama. Fungsi sosial kontrol jelas terurai pada UU pokok pers, sedangkan pada UU penyiaran hal ini tidak ditemukan. Akibatnya, tidaklah mengherankan bila media cetak dan media penyiaran mempunyai sensitivitas dan responsibilitas yang berbeda dalam mengimplementasikan fungsi social control-nya.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif . Bahan penelitian yang akan menjadi objek penelitian peneliti adalah setiap data dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang didapatkan, setelah itu dilakukan pengolahan terhadap bahan yang peneliti dapatkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang sedang peneliti angkat. Unit analisis atau satuan kajian menurut (Morrison, 2017) adalah seluruh hal yang kita teliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan berbagai perbedaan di antara unit analisis tersebut. Dalam riset ilmu sosial tidak ada batasan mengenai unit analisis, yaitu siapa atau apa yang dapat diteliti. Untuk lebih jelasnya terdapat beberapa unit analisis yang umumnya digunakan dalam riset ilmu sosial yang terdiri atas, individu, kelompok, organisasi, interaksi sosial, dan artefak sosial.

Sebelum melakukan penelitian untuk menjelaskan Agenda Setting dan Peranan Pers peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, lalu dokumentasi, studi pustaka, data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif yaitu dari pengamatan terhadap objek penelitian. Setelah data yang peneliti perlukan terkumpul, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori serta konsep yang peneliti sudah dipaparkan di bab sebelumnya. Dengan menganalisis data, peneliti berharap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang peneliti angkat dapat terjawab.

Menurut Krippendorff dalam (Eriyanto, 2015) mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya. Unit analisis secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagian apa dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk menyimpulkan isi dari suatu teks. Bagian dari isi ini bisa berupa kata, kalimat, gambar atau paragraf.

PEMBAHASAN

Menurut Charles Wright (1988) memaparkan tiga fungsi besar komunikasi massa, yaitu fungsi surveillance (pengawasan), fungsi correlation (korelasi), dan fungsi cultural transmission (transmisi budaya). Fungsi pengawasan berarti pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang berlangsung di lingkungan maupun di luar suatu masyarakat tertentu. Kata Stephen W. Littlejohn (1996) pengawasan adalah fungsi komunikasi massa berupa penyampaian informasi dan berita. Jadi, manifestasi fungsi pengawasan di sini berkaitan dengan segala

pemberitaan mengenai peristiwa-peristiwa atau pendapat/komentar sumber berita di era reformasi. Kalau yang disampaikan adalah berita peristiwa, tentu kaidah-kaidah tuntunan kode etik jurnalistik dengan unsur kelengkapan berita atau informasi, adalah panutan yang tidak dapat dihindarkan. Sedangkan kalau hal itu menyangkut pendapat atau komentar sumber berita terhadap sesuatu hal, maka cover both side issue merupakan pedoman yang harus dipegang oleh insan pers.

Sedangkan fungsi korelasi berhubungan dengan bagaimana media massa memilih, menginterpretasi, dan mengkritik peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Fungsi ini meliputi interpretasi informasi mengenai lingkungan dan penggunaannya untuk berperilaku terhadap reaksinya pada suatu peristiwa atau kejadian. Wujud konkrit dari fungsi ini pada umumnya dapat kita lihat pada tajuk rencana atau editorial dan kritik atau sindiran yang terdapat pada rubrik pojok yang tersedia di media massa.

Sementara fungsi transmisi kultural berhubungan dengan kemampuan media menyampaikan aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang ada dan berlaku di suatu masyarakat. Nilai-nilai yang ada disampaikan dari satu generasi ke generasi berikut ataupun dari suatu masyarakat ke anggota masyarakat baru lain. Fungsi ini dapat dimaknai sebagai fungsi edukasi.

Seyogyanya ketiga fungsi komunikasi massa di atas diterapkan secara terintegrasi utuh, tidak secara parsial, dalam penyajian informasi apakah : berita, tajuk rencana, feature, reportase mengenai peristiwa yang di-cover media massa. Dengan begitu, audiens dapat dengan mudah dan cepat memahami peristiwa penting apa yang terjadi saat ini. Apakah peristiwa yang disajikan berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai sosial apa yang dapat diambil dari penyajian tersebut. Diharapkan, apa yang dianggap penting oleh media, juga dianggap sama pentingnya oleh audiens.

Ada beberapa penilaian masyarakat yang menganggap bahwa pers kurang peka terhadap apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diharapkan oleh masyarakat. Pers dianggap lebih mampu membentuk persepsi masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap penting. Dan hal ini merupakan suatu asumsi dasar dari model agenda setting. Bila hal ini benar maka tiga fungsi media komunikasi massa yaitu surveillance, correlation, dan cultural transmission adalah merupakan penerapan dari teori ini.

Berdasarkan beberapa asumsi tentang efek komunikasi massa, satu yang bertahan dan berkembang saat ini menganggap bahwa media massa memberikan perhatian pada issue tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan memiliki pengaruh terhadap public opinion (pendapat umum). Orang akan cenderung mengetahui akan hal-hal yang diberitakan oleh media massa dan menerima susunan prioritas yang disajikan media massa terhadap isu-isu yang berbeda.

Asumsi ini berhasil menepis keraguan yang ditujukan pada hasil penelitian komunikasi massa yang menganggap media massa mempunyai efek yang sangat kuat (powerful), terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar dan bukan dengan perubahan sikap atau pendapat. Studi empiris terhadap komunikasi massa telah menginformasikan bahwa efek yang cenderung terjadi adalah dalam hal informasi. Teori Agenda Setting menawarkan suatu cara untuk menghubungkan temuan ini dengan kemungkinan terjadinya efek terhadap pendapat, karena pada dasarnya yang ditawarkan adalah suatu fungsi belajar dari media massa. Masyarakat belajar mengenai isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingannya.

Maxwell McCombs dan Donald Shaw merupakan dua teoritis dari model agenda setting. Mereka mengatakan bahwa audiens tidak hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting yang diberikan terhadap suatu issue atau topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut. Misalnya, dalam merefleksikan apa yang dikatakan oleh para kandidat dalam suatu kampanye pemilu, media massa terlihat sangat menentukan mana topik yang dianggap penting, terlebih lagi bila media itu bersifat partisan ataupun didanai oleh kepentingan suatu partai. Dengan kata lain, media massa yang

menetapkan agenda kampanye tersebut. Padahal bagi sebagian besar pendapat masyarakat bahwa agenda harga sembako adalah yang lebih penting diberitakan dari pada pemberitaan kampanye kandidat gubernur misalnya.

Kemampuan untuk mempengaruhi perubahan kognitif individu ini merupakan aspek terpenting dari kekuatan komunikasi massa. Dalam hal kampanye, teori ini mengasumsikan bahwa jika para calon pemilih dapat diyakinkan akan pentingnya suatu isu, maka mereka akan memilih kandidat atau partai yang diproyeksikan paling berkompeten dalam menangani isu tersebut.

Asumsi-asumsi agenda setting ini memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan relatif mudah pula untuk diujikan. Dasar pemikirannya adalah, di antara berbagai topik yang dimuat oleh media massa, topik lebih banyak mendapat perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya dan akan dianggap penting dalam suatu kurun waktu tertentu, dan akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media massa, maka menjadi asing atau kurang diketahui dalam pikiran audiens. Lihat saja misalnya kasus Ferdi Sambo, anggota kepolisian dengan pangkat bintang dua, atau inspektur jenderal (irjen) yang menyita ruang media massa begitu padat dan dengan kontinuitas yang seolah tanpa henti setiap hari memberitakan tentang Ferdi Sambo yang diduga memerintahkan Bripda E untuk membunuh Brigadir Y, maka menjadi besar kasus itu dalam pikiran dan ingatan kita. Belum selesai kasus FS, kini hadir lagi kasus polisi bintang dua sebagai Kapolda Jawa Timur yang terlibat kasus Narkoba. Kedua kasus besar ini karena terekspos oleh media, yang tidak mustahil masih kasus-kasus lain yang bisa jadi lebih besar, tapi tidak tercover media massa. Maka public pun tidak dapat berbuat banyak, karena agenda media ditentukan oleh media sendiri. Perkiraan ini dapat diuji dengan membandingkan hasil dari analisis isi media secara kuantitatif dengan perubahan dalam pendapat umum yang diukur melalui survei dua atau lebih waktu yang berbeda.

Pada tahun 1976 misalnya, McCombs dan Shaw mengangkat kasus Watergate sebagai ilustrasi dari fungsi agenda setting. Mereka menunjukkan bahwa sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam mengungkap kasus politik yang korup, tapi pemberitaan surat kabar yang begitu intensif dan diikuti dengan penyiaran dengar pendapat di Dewan Perwakilan melalui televisi, telah melambungkan kasus Watergate menjadi topic of the year pada saat itu. Relatif sama halnya ketika media massa Indonesia memberitakan betapa sudah muaknya masyarakat dengan rezim penguasa orde baru, maka serta merta masyarakat yang dimotori mahasiswa dan kaum reformis berpikiran sama, yaitu melengserkan Soeharto sebagai presiden. Apalagi pada masa itu sikap betapa represifnya rezim terhadap kebebasan pers, dijadikan semacam arena 'balas dendam' pers untuk menyudutkan penguasa. Sehingga terlihat betapa tajamnya pemberitaan mengenai orang nomor satu itu sebagai agenda setting-nya media mendapat perhatian penting oleh media massa dan sama pentingnya masyarakat menganggap hal itu.

Rogers dan Dearing (1988) menjelaskan bahwa dalam perkembangannya model agenda setting terbagi dalam dua kategori yaitu agenda setting dan agenda building. Studi agenda setting menekankan pengaruh media massa terhadap publik, sedangkan studi agenda building concern pada pengaruh agenda publik dan faktor-faktor lainnya, termasuk pengaruh agenda media terhadap agenda kebijaksanaan. Kata Stephen W. Little John (1996), in the theory's simplest and most direct version, the media agenda affects the public agenda, and the public agenda affects the policy agenda. Dan hubungan agenda media, agenda publik, dan agenda kebijaksanaan melahirkan dynamics agenda atau model dinamika agenda (Manheim, 1986).

Telaah tentang agenda media mengkaji latar belakang dan proses penonjolan isu-isu dalam media massa. Hal ini melibatkan proses kognitif dan struktur di mana media massa berada. Media massa dalam penyajian isu melibatkan beberapa gate-keeper yang dalam proses kerja redaksi apa yang ditulis reporter masih diedit oleh desk editor. Sifat topik yang disajikan dalam media menjadi faktor

yang mempengaruhi agenda media. Dalam perspektif struktural dan fungsional, proses ini melibatkan unsur-unsur dalam media dan sistem politik yang ada di suatu negara. Media sebagai saluran ataupun wadah proses demokratisasi, hubungan media dengan pemerintah dan masyarakat jelas akan mempengaruhi agenda media.

Studi tentang agenda publik mengkaji bagaimana audiens dipengaruhi oleh isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Bagi audiens tingkat pentingnya suatu isu yang disajikan media cetak digolongkan dalam tiga kategori yaitu : 1. penting secara pribadi, 2. penting sebagaimana dikatakan orang-orang di lingkungannya, 3. penting menurut pendapat masyarakat (De George, 1981).

Studi tentang agenda kebijaksanaan concern pada kalangan political elite baik secara formal maupun informal. Agenda kebijaksanaan yang dirancang oleh elit politik bukanlah hasil keputusan perseorangan, tetapi hasil kolektif dari suatu struktur yang terdiri dari unsur-unsur decision maker yang saling berkaitan.

Keterkaitan agenda setting media massa dengan proses mengambil suatu keputusan dapat dilihat dalam konteks pembentukan pendapat umum (public opinion). Peranan media massa dalam mekanisme menghubungkan publik dengan pengambil kebijakan dianggap penting. Artinya masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan dengan meminta pendapat mereka yang tercermin dalam tulisan artikel, kolom, bahkan surat pembaca, dan komentar masyarakat lainnya yang disajikan dalam media massa. Ini berarti media massa menjadi media yang bersifat demokrasi di mana gradasi penting menurut pendapat masyarakat sebagaimana kategorisasi De George menjadi acuan media massa dalam menentukan tingkat kepentingan suatu isu.

Dengan begitu, studi tentang agenda kebijaksanaan sebagai pengaruh dari agenda media dan atau agenda publik tidak bisa dipandang sebagai suatu proses kognitif semata. Proses memutuskan suatu kebijaksanaan organisasi merupakan akumulasi proses komunikasi di dalam organisasi. Organisme dalam organisasi memiliki struktur tertentu yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang turut serta dalam pengambilan suatu kebijaksanaan. Dalam perspektif teoritis sebagaimana dikemukakan oleh DeFleur dan Rokeach (1982), hal itu termasuk dalam perspektif fungsionalisme struktural dari model agenda setting. Dalam perspektif ini studi efek agenda setting melihat keterkaitan agenda media, agenda publik, dan agenda kebijaksanaan yang dibuat oleh kelompok elit. Setiap agenda merupakan sub sistem dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam sistem yang lebih luas, sistem politik, agenda media merupakan sub sistem dari sub sistem media massa. Demikian pula agenda kebijaksanaan yang merupakan sub sistem dari sub sistem suatu organisasi.

Dengan begitu, arus efek dari agenda setting dalam jangka waktu tertentu merupakan konsep yang menunjukkan dari mana dan kemana efek mengalir. Status variabel independen (bebas/yang mempengaruhi) dan variabel dependen (terikat/yang dipengaruhi) dapat dimiliki oleh agenda media, agenda publik, maupun agenda kebijaksanaan. Dalam kaitan ini, media massa atas berbagai pertimbangan menyajikan suatu isu menjadi lebih menonjol. Penyajian media terhadap suatu isu dapat mempengaruhi agenda publik, sehingga agenda media dan agenda publik berpeluang mempengaruhi agenda kebijaksanaan.

Arus efek agenda setting dapat berawal dari agenda kebijaksanaan, pada saat kebijaksanaan suatu lembaga disosialisasikan, menimbulkan berbagai komentar dari berbagai khalayak. Dalam hal ini media dapat berfungsi sebagai pengawas, korelasi, dan transmisi kultural sekaligus. Sebagaimana dalam mengemban fungsinya itu, media massa atau pers dapat membuat isu itu besar dan berubah menjadi isu yang penting, terlebih lagi bila kebijaksanaan yang dikeluarkan lembaga itu menyangkut hajat orang banyak.

Terdapat beberapa faktor yang membedakan arus efek agenda setting. Salah satu faktor yang mendasar adalah sistem politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara yang memegang

azas demokrasi yang luas, maka agenda akan bermula dari agenda. Sementara di negara yang menerapkan sistem otoriter, agenda kebijaksanaan akan lebih cenderung menerapkan agenda media dan agenda publik. Pada dasarnya, arus agenda dapat dipengaruhi oleh karakteristik sumber atau lembaga yang menciptakan isu, dan ciri-ciri isu itu sendiri.

Jadi, adalah logis seperti apa yang dikatakan oleh Eldridge (1993), bahwa penetapan agenda oleh media tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Hal ini merupakan hasil hubungan yang berkesinambungan dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan khusus. Dan ini terjadi karena media bertindak sebagai penengah. Media melakukan seleksi, mengedit, mendramatisir, dan memberi penekanan peristiwa atau kejadian sesuai dengan kaidah dan aturan mereka. Di satu sisi media berada di antara publik, dan di sisi lain terdapat lembaga/institusi, peristiwa, dan masyarakat elit yang hegemonis. Media mengembangkan aturan dan perlengkapannya untuk memproduksi sejumlah realitas sosial atau informasi yang bermanfaat. Untuk menerapkan agenda setting secara optimal, media massa (pers) tentu akan menghadapi banyak persoalan apakah internal media itu sendiri maupun eksternal seperti perangkat aturan yang berlaku, para elit, dan publik.

Persoalan internal media misalnya, menyangkut pengelolaan pers itu sendiri. Media sarat akan muatan ideologi, politik, budaya, dan ekonomi (Stevenson, 1995). Oleh karena itu, isu-isu yang diagendakan oleh media massa tidak akan pernah bebas nilai. Pada saat mengemas isu yang bersumber dari agenda kebijaksanaan, agenda publik, atau agenda media, disadari atau tidak dan tersurat atau tersirat salah satu atau keseluruhan muatan ideologi, politik, budaya, dan ekonomi akan masuk ke dalam pengaruh pemberitaan. Apalagi kalau media itu berasal dari kepemilikan partai. Ini tidak berarti pers yang independen luput dari pengaruh muatan di atas.

Seandainya pengaruh muatan ideologi, politik, budaya, dan ekonomi sebagaimana yang dikatakan Stevenson adalah benar, maka kita patut bertanya apakah Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pokok Pers, maupun Undang-Undang Penyiaran yang dijadikan acuan bagi operasional pers nasional dalam melaksanakan profesi mereka, tampaknya akan kurang berarti banyak eksistensinya. Bisa jadi janji-janji pers dengan moto peliputan objektif, balance news, cover both sides hanya kamuflese belaka dan indah di atas kertas.

Peranan pers dalam era reformasi bisa saja terwujud kalau dalam pemberitaannya mengacu dan mengimplementasikan fungsi surveillance (pengawasan), correlation (korelasi), dan cultural transmission (transmisi budaya) dengan memperhatikan unsur unity. Bila unsur-unsur ini dipenuhi, maka social control yang konstruktif dan fungsi edukasi, dapat dilaksanakan dengan baik. Bila semua ini menjadi kenyataan, maka pers telah menerapkan model agenda setting dalam pemberitaannya.

Penerapan agenda setting ; baik agenda media, agenda publik, maupun agenda kebijaksanaan dimaksudkan demi terbentuknya public opinion yang favourable. Dengan terbentuknya pendapat umum yang baik, pers menjadi lebih aspiratif dalam mendinamisasikan kehidupan yang demokratis. Upaya membentuk opini publik dengan pendekatan agenda setting dimungkinkan bila persepsi kita tentang demokrasi telah benar-benar tumbuh subur di negeri ini. Karena itu, perangkat-perangkat aturan yang dapat menghambat perkembangan demokrasi harus dicabut atau ditiadakan. Penerapan agenda setting juga akan berhasil bila mana manajemen pers sendiri memberi otonomi kebebasan redaksional tanpa dipengaruhi kepentingan pemilik modal misalnya. Sebab tidak sedikit dewasa ini pemilik manajemen media massa yang berafiliasi dengan partai tertentu yang mempengaruhi manajemen redaksi sedemikian rupa sehingga pemberitaan media menjadi pembentuk public opinion yang artificial (semu) yang dalam tugasnya menggiring opini public untuk berafiliasi dengan kepentingan pemilik media, yang notabene mengedepankan kepentingan partainya. Jadilah media yang bersangkutan menjadi media partisan.

SIMPULAN

Agenda setting ditentukan atau dipengaruhi agenda manusia dan peristiwa yg terjadi. Agenda setting juga dipengaruhi oleh visi dan misi media. Agenda setting juga dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media (apa lg media partisan). Agenda setting juga dipengaruhi kebijakan redaksional media. Agenda setting juga dipengaruhi kepentingan komersial media. Agenda setting juga dipengaruhi rezim yg berkuasa. Agenda setting bisa juga dipengaruhi oleh situasi yg lg ngetrend di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- De George, W.F., *Conceptualization and Measurement of Audience Agenda*, Mass Communication YearBook, Beverly Hills, Sage Publication, London, 1981.
- DeFleur and Ball Rokeach, *Theories of Mass Communication*, Longman, New York, 1982.
- Eldridge and John (Ed), *Getting the Message, News, Truth, and Power*, Routledge, New York, 1993.
- Littlejohn, Stephen W., *Theories of Human Communication*, Wadsworth Publishing Company, Washington, 1996.
- S. Djuarsa Sendjaja dkk., *Teori Komunikasi*, Penerbit Universitas Terbuka, Cetakan Kesembilan, 2005.
- Stevenson and Nick, *Understanding Media Cultures, Social Theory and Mass Communication*, Sage Publication, London, 1995.
- Wright Charles, *Sosiologi Komunikasi*, Penyunting Jalaluddin Rakhmat, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1988.